

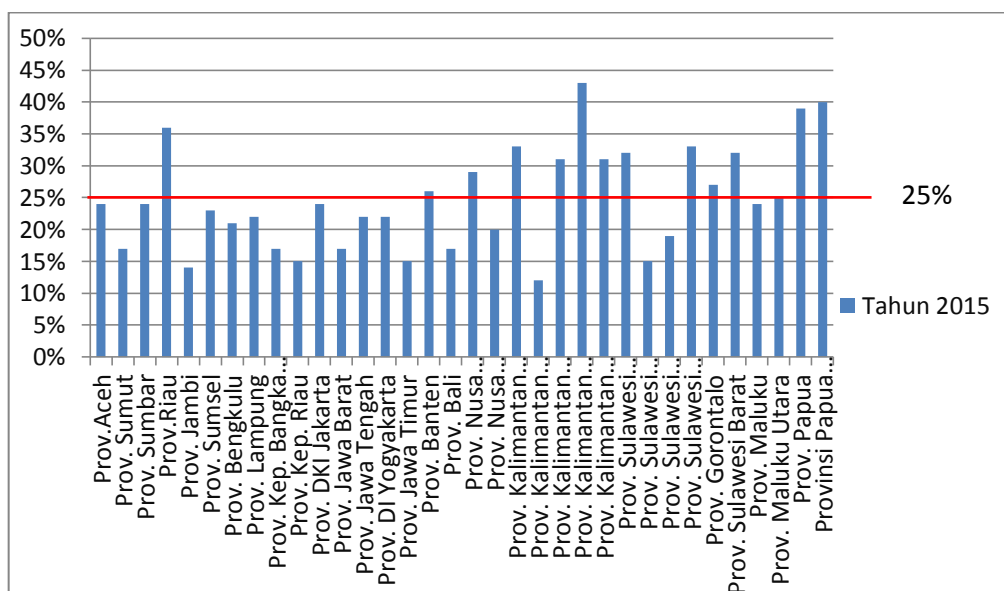
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih merata di Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap daerah untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki. Pemerintah hendaknya meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong ekonomi berkembang dengan seimbang di seluruh Indonesia. Untuk itu belanja modal yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa daerah tersebut sedang memperbaiki infrastrukturnya.

Di Indonesia rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja secara agregat provinsi sebesar 17,4% pada tahun 2012, lalu 18,85% pada tahun 2013, 19,56% untuk tahun 2014 dan 25% pada tahun 2015, meningkatnya rata-rata belanja modal setiap tahunnya merupakan indikasi positif terhadap perbaikan kualitas struktur belanja daerah. Dibawah ini merupakan grafik persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah setiap Provinsi di Indonesia pada tahun 2015:



Sumber: LHP BPK RI (diolah)

Gambar 1.2
Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Prov TA 2015

Dari keseluruhan provinsi, Provinsi Kalimantan Barat memiliki persentase belanja modal dibawah rata-rata sebesar 12%, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase tertinggi sebesar 43%. Dari total 34 Provinsi terdapat 20 Provinsi yang porsi belanja modalnya masih dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan belanja modal, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum merata. Rata-rata realisasi belanja operasi provinsi tahun 2015 adalah 90,23% dan rata-rata realisasi belanja modal provinsi tahun 2015 adalah 85,57%. Dapat dilihat bahwa belanja operasi masih lebih besar daripada belanja modal, hal tersebut dikarenakan belanja pegawai memiliki porsi yang paling besar dalam belanja operasi. Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia menyatakan saat ini pemerintah akan melakukan penghematan belanja negara untuk belanja operasional dan berusaha meningkatkan belanja modal (<http://finansial.bisnis.com>). Dengan peningkatan belanja modal, maka akan ada aktifitas ekonomi di berbagai wilayah. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki *multiplier effect* untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Belanja modal pada pemerintah daerah dapat bersumber dari berbagai pendapatan dan pembiayaan, antara lain SiLPA, DAU, dan DAK. Devas (1989) menjelaskan bahwa Informasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat keputusan perencanaan investasi. Maka dari itu untuk meningkatkan jumlah investor, Pemda harus memperbaiki layanan publik dalam bentuk aset tetap yang termasuk dalam belanja modal, yakni peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya, karena salah satu penggunaan SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. SiLPA juga merupakan sumber penerimaan internal Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk mendanai

kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 137 menyatakan: Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Namun selama ini Pemda kerap menggunakan SiLPA sebagai pendapatan daerah, padahal dana SiLPA merupakan dana sisa yang hanya diperkenankan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan Mentayani dan Rusmanto (2013).

Selain SiLPA APBD, pemangku kepentingan juga menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah. Informasi arus kas pemerintah daerah diyakini mampu memberikan informasi untuk membantu para pemilik kepentingan (pemerintah pusat, rekanan/kontraktor, investor, kreditor dan masyarakat umum) mengukur kinerja pemerintah daerah juga mampu memprediksi arus kas yang akan didistribusikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya di masa yang akan datang. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga memberikan kontribusi bagi belanja modal pemerintah. Tahun 2017, Mardiasmo selaku Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan, untuk mempercepat pembangunan di daerah, maka mulai tahun ini DAU yang

dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, minimal 25% dari yang daerah terima. Sebab, selama ini banyak daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai justru lebih dari 80% (www.ekbis.sindonews.com, 2017).

Faktor kemampuan keuangan atau kerangka ekonomis yang dihadapi pemerintah daerah juga perlu dipertimbangkan dengan memasukkan klasifikasi atau kluster kemampuan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 yang mengatur klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah daerah (Haryanto, 2013). Namun tidak banyak penelitian tentang belanja modal pemerintah daerah yang memasukkan faktor klasifikasi kemampuan keuangan daerah dilakukan di Indonesia. Kemampuan keuangan daerah yang berbeda di setiap pemerintah daerah, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dilambangkan dengan A untuk kemampuan keuangan daerah yang tinggi, B untuk kemampuan keuangan daerah yang sedang, dan C untuk kemampuan keuangan daerah yang rendah dalam penelitian ini.

Salah satunya adalah Haryanto (2013) yang mengukur kinerja pemerintah daerah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA APBD) dan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan serta variabel penganggaran belanja modal untuk mengukur hubungannya dengan informasi SiLPA APBD dan arus kas. Hasilnya menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah kluster a dan c, SiLPA APBD dan arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Namun pada pemerintah daerah berkluster b tidak terdapat satupun variabel yang secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penganggaran belanja modal. Haryanto menggunakan sampel sebanyak 54 pemerintah daerah. Sementara itu Fauzy (2014) dalam penelitiannya menggunakan data seluruh pemerintah daerah kabupaten yang terdapat di Indonesia sebanyak 393 pemerintah daerah dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011.

Hasil penelitian Fauzy (2014) menunjukkan bahwa informasi SiLPA dan informasi arus kas operasional, investasi, serta pembiayaan berpengaruh pada penganggaran belanja modal pemerintah daerah kluster b. Pada pemerintah daerah kluster a, hanya variabel informasi arus kas pembiayaan yang tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster c, semua variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh informasi SiLPA APBD terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah provinsi klaster A?
2. Bagaimana pengaruh Saldo Akhir Laporan Arus Kas Bersih terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah provinsi klaster A?
3. Bagaimana pengaruh informasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah provinsi klaster A?
4. Bagaimana pengaruh informasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah pemerintah provinsi klaster A?
5. Bagaimana pengaruh informasi SiLPA APBD, Saldo Akhir Laporan Arus Kas, informasi DAU, dan informasi DAK secara simultan terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah provinsi klaster A?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan variabel yang dilihat dari Informasi Laporan Keuangan Daerah.
2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Permendagri No.21 tahun 2007.

3. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited BPK tahun anggaran 2011-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh informasi SiLPA terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah pemerintah provinsi klaster A.
2. Untuk mengetahui pengaruh informasi Saldo Akhir Laporan Arus Kas terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah pemerintah provinsi klaster A.
3. Untuk mengetahui pengaruh informasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah pemerintah provinsi klaster A.
4. Untuk mengetahui pengaruh informasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada klaster pemerintah pemerintah provinsi klaster A.
5. Untuk mengetahui pengaruh informasi SiLPA, Saldo Akhir Laporan Arus Kas, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara simultan pada klaster pemerintah pemerintah provinsi klaster A.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Memberi pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis mengenai pengaruh SiLPA, saldo akhir LAK, DAU, dan DAK terhadap belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah Provinsi di Indonesia

Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui efisiensi belanja modal.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi bagi instansi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pembahasan skripsi ini secara singkat yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah meliputi pengertian Belanja Modal, SiLPA, Saldo Akhir Kas LAK, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sampel yang digunakan dalam penelitian dan informasi data-data yang diperlukan dalam melakukan pengujian penelitian meliputi identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, serta model dan teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS versi 20 sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan simpulan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.